LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA

PENENTUAN MODEL INFLASI DI KOTAMADYA MALANG

Oleh :

Dwi Wulandari,SE,MM
Roufah Inayati,SPd

DIBIAYAI DIPA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NO.008/SP2H/PP/DP2M/III/2007 TANGGAL 29 MARET 2007
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2007

ABSTRAK

Dalam pembangunan daerah salah satu kestabilan makroekonomi dapat dilihat dari besanya tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan fenomena yang senantiasa terjadi dalam dalam perekonomian. Dalam konteks makro ekonomi, fluktuasi dalam angka inflasi mencerminkan perkembangan yang berfluktuatif pula pada tingkat harga yang terjadi. Pada sisi mikro ekonomi, fluktuasi harga tersebut akan sangat menentukan perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya di pasar. Apabila fluktuasi harga mengarah pada kenaikan harga secara tajam, maka konsumen akan mengalami penurunan daya belinya. Sebaliknya apabila fluktuasi harga yang ada cenderung mengarah pada penurunan harga, maka konsumen akan merasakan peningkatan daya terhadap belinya. Perkembangan angka inflasi di Kota Malang menunjukkan suatu perkembangan yang dinamis. Kondisi ini dapat dipahami mengingat Kota Malang merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar ditopang oleh perkembangan di sektor jasa dan industri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang semakin meningkat akan mendorong laju inflasi di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan tingkat inflasi di Kota Malang selama tahun 1997-2005. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa inflasi di Kota Malang tidak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, nilai tukar kurs Rp/US$, pengeluaran pembangunan dan PDRB.

Kata Kunci : Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Mata Uang

Abstract

Local autnomy have impact to development in national economic to be change in regional development programme. Planning development with use bottom up, its hope increase participating people in development. In economic progress, there is phenomena in inflation. This phenomena shows increasing of price of good and services as whole and continues. E city of Malang have dynamic development in economic. Many activity can griwth in a sectors, like services, education, industry and tourism. This study try to analisze what determinant of inflation in Malang city from 1997 until 2005. The Methode to solve the problem, we use regression model in OLS. The result is inflation in Malang city can't be affected by money supply, DRP,Exchange rate, and development expenditure ini local government budget.

Keywords : Inflation, Economic Growth, Exchange Rate

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Inflasi	6
2.2 Teori Inflasi	8
2.3 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian	11
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi	16
2.5 Penelitian Sebelumnya	24
BAB III : METODE PENELITIAN	26
3.1 Lokasi Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
BAB IV : PEMBAHASAN	29
4.1 Perkembangan Inflasi Di Kota Malang	29
4.2 Perkembangan PDRB Kota Malang	31
4.3 Perkembangan Jumlah Uang Beredar Kota Malang	32
4.4 Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang di Kota Malang	33
4.5 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan di Kota Malang	34
4.6 Hasil Analisis	35
BAB V : PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Jurnal Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika pembangunan daerah dewasa ini ditandai oleh perubahan dalam strategi pembangunannya yang lebih mengedepankan aspek keterwakilan masyarakat daerah dalam kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah pe 1 Januari 2001 merupakan harapan baru bagi masyarakat akan terciptanya kestabilan perekonomian dan pembangunan di dareah. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasai, maka secara eksplisit telah dituangkan pemerintah dalam UU no 5 tahun 1974 tentang hak-hak pemerintah daerah dalam otonomi daerah, UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut dimaksudkan uintuk memberikan kewenangan pada setiap daerah di Indonesia untuk dapat mengelola pembangunannya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya. Satu kesimpulan penting dari kedua Undang-undang tersebut adalah agar daerah memiliki inisiatif dan kemandirian dalam memajukan pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya.

Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut adalah aspek fiskal. Aspek fiskal ini terkait dengan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan (Sidik, 2001). Daerah dengan potensi keuangan yang tinggi akan dapat menjalankan kemandirian pembangunannya dengan baik. Sebaliknya daerah dengan potensi keuangan daerah yang jelek akan mengalami banyak hambatan

dalam menjalankan kemandirian pembangunannya. Guna menjaga aspek pemerataan pembangunan dan meminimalkan kecemburuan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam, maka pemerintah membentuk suatu konsep perimbangan keuangan baik secara vertikal maupun secara horisontal. Dalam konsep perimbangan keuangan tersebut ditentukan seberapa besar perolehan keuangan daerah sesuai dengan sumbangannya terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini aspek pemerataan dan keadilan dituangkan lebih jauh dalam bentuk sumbangan dan bantuan, Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam era otonomi daerah kemandirian daerah merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi. Setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain yang tersebar di seluruh belahan dunia, terutama dalam menarik sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian, kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunannya masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Radianto,1997).

Dalam pembangunan daerah salah satu kestabilan makroekonomi dapat dilihat dari besanya tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan fenomena yang senantiasa terjadi dalam dalam perekonomian. Dalam konteks makro ekonomi, fluktuasi dalam angka inflasi mencerminkan perkembangan yang berfluktuatif pula pada tingkat harga yang terjadi. Pada sisi mikro ekonomi, fluktuasi harga tersebut akan sangat menentukan perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya di pasar. Apabila fluktuasi harga mengarah pada kenaikan harga secara tajam, maka konsumen akan mengalami penurunan daya belinya. Sebaliknya apabila fluktuasi harga yang ada cenderung mengarah pada penurunan harga, maka konsumen akan merasakan peningkatan daya terhadap belinya.

Perkembangan angka inflasi di Kota Malang menunjukkan suatu perkembangan yang dinamis. Kondisi ini dapat dipahami mengingat Kota Malang merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar ditopang oleh perkembangan di sektor jasa dan industri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang semakin meningkat akan mendorong laju inflasi di Kota Malang.

Sesuai dengan Undang-undang baru tentang fungsi Bank Indonesia (UU No. 23 Tahu 1999) dijelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki fungsi utama dalam perekonomian, yakni mengendalikan tingkat harga dalam negeri (UU BI No 23/1999). Sejalan dengan undang-undang tersebut, maka sudah selayaknya otoritas moneter di Kota Malang merumuskan suatu kebijakan yang mengarah pada kestabilan harga khususnya di Kota Malang.

Pada sisi lain, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah pada pemerintahan Kota Malang semakin menuntut akan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini mengandung arti bahwa daerah memiliki kewenangan penuh dalam optimalisasi sumber-sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) dan mengalokasikannya pada sektor-sektor kegiatan yang diinginkan. Kemandirian daerah dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah tersebut dapat berdampak pada kestabilan harga di Kota Malang. Dari sisi *demand* kenaikan harga akan terjadi apabila pengeluaran daerah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan penurunan harga akan terjadi apabila pengeluaran daerah tidak mendorong kegiatan ekonomi, sehingga pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan.

Fenomena inflasi merupakan fenomena alamiah yang senantiasa terjadi dalam perekonomian. Bagi otoritas moneter, inflasi yang terkendali merupakan target akhir dari suatu kebijakan moneter. Selain itu dari sisi fiskal, perilaku pemerintah daerah dalam membelanjakan anggarannya juga akan mempengaruhi perkembangan inflasi yang terjadi. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu sinkronisasi tindakan antara otoritas moneter di Kota dan pemerintah daerah Kota Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu model inflasi di Kota Malang selama tahun 1997-2005.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maasalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Faktor-faktor apa yang menentukan tingkat inflasi di Kota Malang selama tahun 1997-2005

b. Faktor dominan apa yang mempngaruhi tingkat inflasi di Kota Malang selama tahun 1997-2005

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai :

a. Faktor-faktor yang menentukan tingkat inflasi di Kota Malang selama periode waktu 1997-2005

b. Faktor dominan yang mempngaruhi tingkat inflasi di Kota Malang selama tahun 1997-2005

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Bagi Pemerintah Kota Malang, memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

b. Bagi Bank Indonesia Malang, sebagai bahan kajian dalam pengendalian inflasi di Kota Malang.

c. Bagi masyarakat, sebagai informasi dalam menganalisis perkembangan pembangunan di Kota malang

d. Bagi Peneliti lain, sebagai studi banding dalam mengamati fenomena inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.